

KPBB Sebuah Harapan? *Joint Committee For Leaded Gasoline Phase-Out*

Pada Juni 1993, beberapa NGO menyelenggarakan diskusi mengenai udara bersih, yang antara memberikan focus pada upaya penghapusan bensin bertimbel. Rekomendasi diskusi ini kemudian disampaikan kepada beberapa pihak termasuk Menteri Negara Lingkungan Hidup RI, yang mana hal ini ditambah dengan Rekomendasi Earth Summit di Rio De Janeiro kemudian memberikan wacana bagi pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan bensin tanpa timbel.

Isu bensin tanpa timbal (Pb) mulai dicanangkan secara resmi oleh Pemerintah saat pencaanangan Program Langit Biru (PLB) oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup di Semarang, 6 Agustus 1996. Secara kronologis kebijakan dan kegiatan yang ditempuh pemerintah dan munculnya NGO yang *concern* terhadap isu tersebut dapat disimak pada tabel di bawah ini.

Tabel : Kronologi Isu Pb Di Indonesia

Tahun	KEBIJAKAN DAN KEGIATAN PENGHAPUSAN BENSIN BERTIMBAL
1996	<ul style="list-style-type: none"> a. LEMKOHI dan beberapa NGO menggelar kampanye Langit Biru di Monas Jakarta, kemudian lahir kesepakatan antara NGO, Gaikindo, BAPEDAL, Menteri Pertambangan dan Energi RI (IB Sujana) untuk mensukseskan program tersebut. b. Pada event yang diselenggarakan pada 29 Oktober 1996 ini, Meneg LH sampaikan Policy Paper kepada Presiden. c. Pada event ini, Presiden menekankan agar semua pihak berpartisipasi untuk menerapkan kebijakan bensin tanpa timbel pada tahun 1999 termasuk Pertamina agar tidak lagi memproduksi bensin bertimbal (Pb) pada akhir 1999.
1997	<ul style="list-style-type: none"> a. Surat MenegLH pada Dirut Pertamina tentang pembangunan catalytic reformer dalam rangka mempercepat pengadaan bensin tanpa timbal dan surat jawaban Pertamina kepada MenegLH. b. Penelitian tanggapan masyarakat tentang pengetahuan bahaya bensin bertimbal dilakukan YLKI dan Lemkohi pada bulan Juli 1997. c. Lokakarya Nasional Sistem Transportasi Lingkungan abad 21 – Lemkohi, September 1997. d. Sosialisasi hasil riset tanggapan masyarakat tentang bensin bertimbal, YLKI – Walhi Jakarta. e. Kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dengan IMF tahun 1997 pada butir 50, agar penghapusan Timbal (Pb) dapat dilaksanakan sebagaimana policy yang telah disampaikan pada Presiden.
1998	<ul style="list-style-type: none"> a. Sosialisasi penggunaan Bahan Bakar Gas, Super TT, dan Bensin Biru sebagai bahan bakar tanpa timbal, dan upaya penurunan Emisi gas buang pada kendaraan bermotor melalui pemasangan catalytic converter. b. Kampanye Segar! Jakartaku kerjasama antara Pemda DKI dengan Swisscontact, pelatihan ketrampilan montir mobil agar menghasilkan emisi gas buang seminimal mungkin. Kegiatan lain Uji Emisi dan lomba Emisi Gas Buang kendaraan bermotor antar kantor di Jakarta. c. Riset penerapan kebijakan Letter of intern RI dan IMF, butir 50 mengenai konversi energi bersih termasuk bensin tanpa timbal, oleh Walhi Jakarta, Juni-Juli 1998. d. Semiloka penerapan butir 50 Lol RI-IMF, tentang energi bersih, Walhi Jakarta, 12 Agustus 1998.
1999	<ul style="list-style-type: none"> a. Tanggal 29 Juli 1999 Surat MenegLH/Ka.BAPEDAL, ditujukan pada Mentamben perihal kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) tanpa timbal. b. Pada 6 September 1999 Surat jawaban Mentamben pada MenegLH/Ka. BAPEDAL, bahwa upaya penghapusan bensin dari kandungan Timbal (Pb) dilakukan secara bertahap. c. Tanggapan atas surat Mentamben No.2899/30/MPE.M/99 yang ditujukan pada MenegLH/Ka. BAPEDAL oleh Chaerudin Hasyim Kasubdit Sumber Bergerak Dit. Pencemaran Udara, yang isinya menyatakan bahwa Pertamina belum menyampaikan batas waktu penyediaan bensin tanpa timbal, dan dominasi BBM masih pada bensin bertimbal (98,81%). d. Pada Kamis, 7 Oktober 1999 Deklarasi Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) di HOTEL KEMANG Jakarta. Merupakan suatu network untuk advokasi penghapusan bensin bertimbal. KPBB dipelopori ICEL, Lemkohi, Walhi Jakarta dan Program Segar! Jakartaku.

	<p>e. <u>Pada 13 Oktober 1999 keluar Keputusan Mentamben No.1585.K/32/MPE/1999 tentang persyaratan Bahan Bakar Jenis Bensin dan Solar di dalam negeri yang isinya paling lambat 1 Januari 2003, semua BBM Bensin harus bebas timbal.</u></p> <p>f. Terbitnya PP No.41 tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara.</p> <p>g. Penjelasan Bapedal seputar Policy Program Langit Biru, termasuk penghapusan bensin bertimbal pada DPR RI.</p> <p>h. Pada 10 Oktober 1999 KPBB bersama WWF, Walhi, Komphalindo, MPL adakan hearing dengan panitia Ad hoc I MPR, memberikan masukan agar aspek lingkungan hidup dimasukkan dalam GBHN.</p> <p>i. Pada 8 Desember 1999 KPBB bentuk NGO/LSM Forum. Forum ini terdiri dari LPPS, KPSM, PT Corelab Indonesia, Pelangi Indonesia, Maj Ozon, SPA, ZPG Indonesia, PS UI, Walhi Jkt, NDeF, PPSML UI, YLKI, PT Multikarya Mulia, Indo-Refro, ENSY, PKBI, ICEL, Ampel, LLI, IRCES, AKL, Perbanas, Syarifa Found., US-AEP, Kempala UT, Agrawitaka, Univ. Mostopo, Austrade, Swisscontact, PT Sumber Daya Hijau, Ranita IAIN, JKPP Bogor, KMPA Eka Citra UNJ, Yay Sahabat Aqua, UNFPA/MNLH, IISIP, Warta Kota, Univ. Pancasila, Maj Angkasa, HU Kompas, UT Tangerang, Kapa UI. Dengan tekad: "Bensin bertimbal harus dihapuskan demi generasi yang akan datang!"</p> <p>j. Pada 30 Desember 1999 KPBB audiensi dengan Ketua Komisi VIII DPR RI tentang pengenalan KPBB, diskusi tentang pengaruh Pb terhadap berbagai aspek, diusulkan untuk mengadakan public hearing setelah masa reses, Komisi VIII akan menghadiri workshop KPBB.</p> <p>k. Pada 27-31 Desember 1999 KPBB mengadakan pertemuan secara maraton dengan Direktur Pengelolaan Pertamina, Deputi Sarana dan Prasana Bappenas, Dirjen Migas, Staf ahli Mentamben, Bapedal, Dep. Kesehatan dan US-EPA (AS).</p>
2000	<p>a. Pada 17 Januari 2000 KPBB rapat dengan Tim Langit Biru, dihadiri MenegLH Sonny Keraf, Pertamina, Lemigas, Gaikindo, Otogas, PT Astra, PT Pantia Motor, PASMI, Kramayudha, Dephub, Bappenas, Polri, PU. Kesimpulan rapat: (i) semua stakeholder sudah menyatakan siap tentang rencana penghapusan bensin bertimbal di Indonesia; (ii) akan diselenggarakan pertemuan lagi untuk membahas lebih detail program tsb.</p> <p>b. Pada 28-29 Pebruari 1999 Lokakarya Stakeholders tentang penghapusan bensin bertimbal, yang akan diikuti MenegLH/Bapedal, Deptamben, Dephub, Deperindag, Pertamina, Texaco, Caltex, PT SPA/ Elnusa/Giga Intrax, Depkeu, Bappenas, Depkes, FKM-UI, Econit, LPEM, YLKI, Pelangi Indonesia, Gaikindo, PT Jati Samudera Biru, Komisi VIII dan IX DPR RI, Dittantas Polri, Organda DKI, LPIST, LBH, ISJ, PIPLI, Ampel, Swisscontact, Pers.</p> <p>c. Public hearing dengan MPR/DPR RI, Pemerintah, Lembaga donor, dan NGO Internasional.</p> <p>d. Tanggal 9 Juni 2000 diselenggarakan Consultative Group Meeting "Penghapusan Bensin Bertimbal" sebagai wahana konsultasi 3 (tiga) bulanan terhadap penghapusan bensin bertimbal di Indonesia. Konsultasi ini dihadiri oleh seluruh stakeholder yang terkait dengan bensin tanpa timbel.</p> <p>e. Tanggal 26 September 2000 diselenggarakan Consultative Gorup Meeting "Penghapusan Bensin Bertibmel" sebagai wahana konsultasi 3 (tiga) bulanan terhadap penghapusan bensin bertimbal di Indonesia.</p> <p>f. Advokasi publik: dalam kegiatan ini KPBB melibatkan 1.000.000 (satu juta) orang. KPBB membangun aliansi dan network dengan 1500 kelompok dari 146 negara di dunia.</p> <p>g. Technical Assistance oleh PT Hicling yang didukung oleh CIDA yang dimaksudkan untuk memberikan masukan mengenai rencana penghapusan bensin bertimbal di Indonesia (Juli – Desember 2000).</p> <p>h. Diskusi intensif antar core team yang beranggotakan KPBB, BAPPENAS, BAPEDAL, Migas, Pertamina, CIDA/PT Hicling; yang membahas mengenai rencana aksi penerapan kebijakan bensin tanpa timbel termasuk mempersiapkan draft Keputusan Presiden.</p> <p>i. Tanggal 23 November 2000 diselenggarakan Consultative Gorup Meeting "Penghapusan Bensin Bertimbal" sebagai wahana konsultasi 3 (tiga) bulanan terhadap penghapusan bensin bertimbal di Indonesia.</p> <p>j. Pada tanggal 1 Desember 2000, KPBB dan Walhi beraudiensi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI, DR Purnomo Yusgiantoro. Pada kesempatan ini KPBB mempresentasikan Alternatif Kebijakan Bensin Tanpa Timbel. Pada akhir audiensi disepakati bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI akan mengatur pertemuan antara KPBB dengan DKPP (Dewan</p>

	<p>Komisaris Pemerintah untuk Pertamina).</p> <p>k. Pada tanggal 14 Desember 2000, pertemuan dengan DKPP. Hadir pada pertemuan ini antara lain BAPPENAS, BAPEDAL, KPBB, WALHI, LEMKOHI, ICEL, GAIKINDO, IATO, SWISSCONTACT, MIGAS, LEMIGAS. Pada pertemuan ini kembali disampaikan Alternatif Kebijakan Bensin Tanpa Timbel yang dilengkapi dengan konsekuensi terhadap harga bensin serta jadwal penghapusan bensin bertimbel (Juni 2001 untuk Jakarta dan Januari 2001 untuk Indonesia).</p>
2001	<p>a. Tanggal 12 Januari 2001, kembali pertemuan di DKPP (lanjutan pertemuan tanggal 14 Desember 2000). Kali ini Pertamina mempresentasikan mengenai rencana teknis penghapusan bensin bertimbel. Pada pertemuan ini disepakati bahwa penghapusan bensin bertimbel untuk Jakarta akan direalisasikan pada 1 Juli 2001. Ini sesuai dengan kesiapan teknis dari Pertamina.</p> <p>b. Pada 7 Februari 2001, Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI membicarakan langkah-langkah teknis dalam rangka persiapan "1 Juli 2001, Jakarta Bebas Bensin Bertimbel".</p> <p>c. Tanggal 20 Februari 2001 diselenggarakan Consultative Group Meeting "Penghapusan Bensin Bertimbel" sebagai wahana konsultasi 3 (tiga) bulanan terhadap penghapusan bensin bertimbel di Indonesia.</p> <p>d. Tanggal 2 – 4 April 2001 diselenggarakan Workshop mengenai Strategi Komunikasi Masa Penghapusan Bensin Bertimbel kerja sama antara US-EPA, US-AEP, Swisscontact, BAPEDAL dan KPBB.</p> <p>e. Kampanye "Jakarta Bebas Bensin Bertimbel" mulai April – Juli 2001 melalui berbagai media dan event (media elektronika, press, on the street campaign dll).</p> <p>f. Tanggal 15 Juni 2001, Penutupan Injeksi TEL di Kilang Balongan. Mulai tanggal ini Kilang Balongan memproduksi bensin tanpa timbel untuk DKI Jakarta dan sekitarnya.</p> <p>g. Tanggal 25 Juni 2001 diselenggarakan Consultative Group Meeting "Jakartaku tak bertimbel?" sebagai wahana konsultasi 3 (tiga) bulanan terhadap penghapusan bensin bertimbel di Indonesia.</p> <p>h. 1 Juli 2001, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI, Menteri Negara Lingkungan Hidup RI, Gubernur DKI Jakarta dan Direktur Utama Pertamina mencanangkan Jakarta Bebas Bensin Bertimbel di Balai Kota.</p> <p>i. Tanggal 16 – 19 Juli 2001 diselenggarakan Workshop Strategi Komunikasi Masa Penghapusan Bensin Bertimbel untuk Indonesia Wilayah Timur diselenggarakan di Bali. Tanggal 23 – 26 Juli 2001 diselenggarakan workshop serupa untuk Indonesia Wilayah Barat (di Medan). Workshop dimaksudkan untuk menyusun strategi dan rencana aksi penghapusan bensin bertimbel di kedua wilayah tersebut, sehingga pemerintah Indonesia konsisten untuk menerapkan kebijakan bensin tanpa timbel untuk seluruh Indonesia.</p>

Sumber: kompilasi dari berbagai sumber, KPBB 2001.